

**EFEKTIVITAS PELAYANAN KTP-EL DALAM RANGKA MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN STATUS PRIBADI DAN HUKUM WARGA NEGARA
DI KOTA PADANG**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Guna Menyelesaikan Strata Dua (S2)**

Oleh:
UNIVERSITAS ANDALAS

YUDI JHONARY PRATAMA

BP: 1620112048

Dibawah Bimbingan :

Prof. Yuliandri, S.H.,M.H.

Dr. Yuslim, S.H.,M.H.



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM DAN PROGRAM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

UNIVERSITAS ANDALAS

2020

EFEKTIVITAS PELAYANAN KTP-EL DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN STATUS PRIBADI DAN HUKUM WARGA NEGARA DI KOTA PADANG

Yudi Jhonary Pratama, 1620112048, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 114 halaman, Tahun 2020
Pembimbing Prof. Yuliandri, SH, MH., dan Dr. Yuslim, SH. MH.

ABSTRAK

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin setiap hak-hak warga negara. Salah satunya yaitu hak masyarakat untuk diakui dan dilindungi oleh Negara. Negara memiliki kewajiban terhadap perlindungan penduduk. Bentuk pengakuan dari Negara yaitu dengan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Perkembangan teknologi mengharuskan pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan dengan basis elektronik. Oleh karena itu pemerintah pusat melalui pemerintah daerah melakukan percepatan pendataan penduduk di wilayah masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah kota Padang banyak menemui permasalahan. Pelaksanaan pembaharuan dan pencetakan KTP-El masih belum memenuhi target. Hal tersebut memberikan dampak besar terhadap pemenuhan hak masyarakat, dimana KTP-El merupakan persyaratan dasar dari setiap unsur pelayanan. Oleh karena itu kepemilikan KTP-el bagi setiap masyarakat sudah seharusnya menjadi perhatian penting pemerintah kota Padang. Untuk melihat efektivitas pelayanan KTP-el dalam rangka memberikan perlindungan status pribadi dan hukum warga Negara di kota padang penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Proses pelayanan KTP-el. 2. Perlindungan status pribadi dan hukum dalam pelayanan KTP-el terhadap hak konstitusional warga Negara. Lokasi penelitian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Dari hasil penelitian diperoleh: 1. Proses pelayanan KTP-el harus mengoptimalkan distribusi tugas ke tingkat Kecamatan dengan memperhatikan standar pelayanan minimum, melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media, dan memfasilitasi pengembangan, penempatan pegawai serta sarana dan prasarana. 2. Bentuk perlindungan hak konstitusi warga Negara, pemerintah kota padang menyurati lembaga pemberi pelayanan terhadap pemberlakuan surat keterangan sebagai pengganti sementara KTP-el dan memberikan skala prioritas terhadap masyarakat yang memerlukan KTP-el sebagai salah satu persyaratan pelayanan.

Kata kunci: Administrasi Kependudukan, pelayanan KTP-el, perlindungan hak konstitusi warga Negara

EFFECTIVENESS OF KTP-EL SERVICES IN ORDER TO PROVIDE LEGAL STATUS PROTECTION IN PADANG CITY

Yudi Jhonary Pratama, 1620112048, Law Faculty of Andalas University, 114 pages, year 2020
Advisor Prof. Yuliandri, SH, MH., dan Dr. Yuslim, SH. MH.

ABSTRACT

The Constitution of Republic Indonesia guarantees every citizens' rights. One of them is the people's right to be recognized and protected by the State. The state has an obligation to protect the population. Certified recognition from the State is by issuing Identity Cards (KTP). Technological developments require the government to update population data on an electronic basis. Therefore the central government through the regional government is accelerating the data collection of residents in their respective regions. But in its implementation the government of Padang city encountered many problems. The implementation of the renewal and printing of KTP-El still has not met the target. This has a major impact on the fulfillment of community rights, where KTP-El is a basic requirement of each service element. Therefore, ownership of KTP-el for every community should be an important concern of the Padang city government. To see the effectiveness of KTP-el service in order to provide protection for the personal and legal status of citizens in Padang city, the writer formulates the problem as follows: 1. The process of KTP-el service. 2. Protection of personal and legal status in the service of KTP-el against the constitutional rights of citizens. The research location is the Padang City Population and Civil Registry Office. From the research results obtained: 1. The process of KTP-el services must optimize the distribution of tasks to the district level by paying attention to minimum service standards, carrying out socialization through various media, and facilitate the development, placement of employees as well as facilities and infrastructure. 2. In the form of protecting the constitutional rights of citizens, the city government of Padang wrote to the service provider institutions regarding the application of the certificate as a temporary substitute for the KTP el and giving priority scale to the people who needed the KTP el as one of the service requirements.

Keywords: Population Administration, KTP-el services, protection of citizens' constitutional rights

